

**PENATAGUNAAN DAN KEGUNAAN: PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN  
UNTUK TRANSPARANSI BERBASIS INFORMASI**  
(Stewardship And Use: Policy Principles For Information-Based Transparency)

---

**Afriadi Amin<sup>1)</sup>, Abdul Karim Batubara<sup>2)</sup>, Putri Asa Parent<sup>3)</sup>, Sriulina Maha<sup>4)</sup>, Sarida  
Sinulingga<sup>5)</sup>, Ikbal Fauzi<sup>6)</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6)</sup> Jurusan ilmu perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [asaputri657@gmail.com](mailto:asaputri657@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Artikel ini merupakan eksplorasi konseptual dan empiris dari ketegangan yang melekat dalam dorongan untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan melalui akses dan diseminasi informasi. Gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus terbuka, dapat diakses, dan transparan bagi yang diperintah menerima penekanan baru melalui kombinasi upaya reformasi pemerintah dan munculnya perangkat teknologi maju untuk akses informasi. Meskipun inisiatif ini masih muda, mereka sudah menunjukkan kompleksitas yang menakutkan, dengan tantangan manajemen, teknologi, dan kebijakan yang signifikan. Berbagai kerangka kebijakan informasi tradisional dan baru menawarkan panduan, sementara beragam perspektif penelitian menyoroti baik tantangan maupun peluang untuk mempromosikan transparansi berbasis informasi. Pengalaman awal dengan Data.gov, komponen utama dari US Open Government Initiative, menunjukkan bahwa dua prinsip dasar kebijakan informasi, penatagunaan dan kegunaan, dapat membantu memandu dan mengevaluasi upaya untuk mencapai transparansi berbasis informasi.*

**Kata Kunci:** *Transparansi Kebijakan informasi, Penatalayanan informasi, Kegunaan informasi, Utilitas informasi.*

**A.PENDAHULUAN**

Kebijakan publik yang berkaitan dengan arus informasi adalah salah satu aspek yang paling mendasar dari demokrasi. Kebijakan ini mencerminkan pilihan masyarakat tentang bagaimana informasi harus diproduksi, diproses, disimpan, dipertukarkan, dan diatur (Benkler, 1998). Di Amerika Serikat, misalnya, Amandemen Pertama Konstitusi mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi kebebasan berekspresi, pers yang independen, dan pertukaran informasi yang bebas di antara warga negara. Ini mencerminkan nilai-nilai kuat yang melekat pada keinginan keragaman dalam sumber informasi dan konten serta akses universal dan partisipasi dalam pasar ide. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah memperlakukan informasi sebagai objek kebijakan, yaitu informasi itu sendiri yang menjadi subjek pembuatan kebijakan. Kebijakan ini cenderung memberikan pedoman umum yang luas dan memperlakukan pemerintah sebagai pengatur arus informasi masyarakat.

Selain hak kebebasan berekspresi Amandemen Pertama, contoh kebijakan semacam ini ditemukan dalam undang-undang yang melarang penyensoran, melindungi privasi pribadi, dan memberikan perlindungan paten dan hak cipta untuk kekayaan intelektual.

Namun, selain peran regulasi, pemerintah juga merupakan pengumpul informasi, produsen, penyedia, dan pengguna. Dalam peran ini, pemerintah memperlakukan informasi sebagai instrumen kebijakan. Dalam melakukannya, ia membuat keputusan tentang apakah dan bagaimana mengumpulkan, mengembangkan, menyebarluaskan, menganalisis, dan menyimpan informasi untuk melayani beberapa prinsip kebijakan lain (seperti transparansi, akuntabilitas, atau keadilan sosial), atau untuk mencapai tujuan tertentu dalam kebijakan informasi cenderung spesifik dan preskriptif. Mereka umumnya dilakukan dengan salah satu dari tiga cara: dengan mengumpulkan data untuk tujuan publikasi, dengan meminta entitas swasta untuk mempublikasikan jenis informasi tertentu, atau dengan merilis informasi publik yang dikumpulkan selama operasi program pemerintah dan kegiatan pengaturan.

Metode pertama dicontohkan oleh pekerjaan Biro Sensus AS, Statistik Kanada, dan organisasi serupa di hampir setiap negara yang mengumpulkan data standar dan menerbitkan seri statistik dan laporan khusus yang merupakan sumber resmi informasi publik tentang populasi dan ekonomi. Kebijakan Departemen Kesehatan Kota New York mengilustrasikan metode implementasi kebijakan yang kedua. Departemen mewajibkan restoran berantai untuk memposting konten kalori dari setiap item menu dengan harapan konsumen akan mempertimbangkan informasi tersebut dalam membuat pilihan makanan yang lebih sehat.

Metode pertama dicontohkan oleh pekerjaan Biro Sensus AS, Statistik Kanada, dan organisasi serupa di hampir setiap negara yang mengumpulkan data standar dan menerbitkan rangkaian statistik dan laporan khusus yang merupakan sumber resmi informasi publik tentang populasi dan ekonomi. Kebijakan Departemen Kesehatan Kota New York mengilustrasikan metode implementasi kebijakan yang kedua. Departemen mewajibkan restoran berantai untuk memposting konten kalori dari setiap item menu dengan harapan konsumen akan mempertimbangkan informasi tersebut dalam membuat pilihan makanan yang lebih sehat. Departemen tersebut tidak mengumpulkan atau melaporkan data kalori itu sendiri, melainkan meminta restoran untuk mengumpulkan dan memberikannya langsung kepada pelanggan. Dalam metode ketiga, informasi yang dikumpulkan atau diproduksi oleh pemerintah untuk tujuan operasional atau manajemen program dirilis ke publik untuk beberapa tujuan tambahan atau sekunder. Misalnya, “rapor” sekolah negeri menggunakan data tes siswa dan informasi anggaran untuk menyoroti kinerja sekolah untuk dipertimbangkan oleh orang tua dan anggota masyarakat saat mereka merumuskan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan.

Makalah ini merupakan eksplorasi konseptual dan empiris dari ketegangan yang melekat dalam dorongan untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan melalui akses dan diseminasi informasi. Karr (2008) merangkum tiga ketegangan abadi yang terkait dengan penggunaan publik atas informasi pemerintah. Ketegangan pertama adalah antara kelengkapan data dan pemahamannya oleh warga yang tidak berorientasi teknis. Ketegangan kedua adalah antara keinginan untuk memastikan kegunaan data terperinci dan secara bersamaan melindungi kerahasiaan subjek data. Yang ketiga adalah kebutuhan dan keinginan publik untuk menganalisis dan memahami kumpulan data “global” versus kenyataan bahwa data pemerintah tidak dipertahankan sebagai aset global melainkan didistribusikan ke banyak organisasi dan domain kebijakan, di semua tingkat pemerintahan.

Ketegangan juga muncul sehubungan dengan rilis informasi pemerintah yang dapat disalah tafsirkan karena kurangnya metadata deskriptif, atau kebutuhan akan kerangka acuan ahli atau keterampilan analitis khusus (Dawes, Pardo, & Cresswell, 2004). Masalah ini sering muncul ketika informasi digunakan untuk tujuan selain tujuan pengumpulannya.

Informasi tersebut umumnya tidak dikumpulkan dengan mempertimbangkan rilis publik. Ini jarang dikelola dengan cara terstruktur seperti data sensus atau statistik standar lainnya yang dikelola, membuatnya lebih sulit bagi orang lain untuk menggunakan dan menafsirkan dan lebih mudah disalahpahami dan disalahgunakan. Selain itu, beberapa informasi dianggap terlalu sensitif atau berbahaya untuk diungkapkan kepada publik (seperti rincian pembangkit listrik tenaga nuklir, instalasi militer, atau jaringan listrik), terutama mengingat meningkatnya ancaman keamanan global.

Inisiatif pembuatan aturan elektronik ekstensif yang dimaksudkan untuk memberi warga negara, bisnis, kelompok advokasi, peneliti, dan pengacara dengan informasi dan alat elektronik untuk menemukan peraturan yang diusulkan, mengirimkan komentar, melakukan analisis independen, dan melacak kemajuan pengembangan aturan. Perubahan back office yang ekstensif dalam proses pembuatan aturan, yang masih dalam proses, merupakan bagian penting dari upaya ini.

Serangkaian masalah tambahan dikaitkan dengan informasi yang dimaksudkan untuk dipublikasikan tetapi tidak secara valid atau akurat mengukur hal-hal yang dimaksudkan untuk diwakilinya. Laporan kinerja seperti "kartu laporan" dan "tolok ukur" dikritik karena kelemahan ini karena mereduksi fenomena kompleks menjadi angka sederhana atau nilai huruf yang mengabaikan skala, ruang lingkup, dan konteks, dan dapat menutupi masalah kualitas data (Bannister, 2007).

Terlepas dari tantangan ini, akses ke informasi pemerintah menerima penekanan baru di seluruh dunia. Penekanan ini mencerminkan dua tren: 1) dorongan untuk reformasi pemerintah yang menekankan keterbukaan dan transparansi, dan 2) peningkatan ketersediaan dan pengembangan berkelanjutan teknologi informasi yang memungkinkan lembaga, organisasi, dan individu untuk menemukan, berbagi, menggabungkan, dan menggunakan kembali informasi pemerintah isi.

Meskipun inisiatif ini masih sangat muda, mereka sudah menunjukkan kompleksitas yang menakutkan, dengan tantangan manajemen informasi, teknologi dan kebijakan yang signifikan. Semua sumber daya informasi berbasis web yang dijelaskan di atas dipuji sebagai inovasi, tetapi juga dikritik karena tidak lengkap, tidak akurat, sulit digunakan, sulit dipahami, ketinggalan zaman, atau mahal untuk dioperasikan, dikoordinasikan, dan dipelihara.

## **D.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka Kerja Informasi Pemerintah**

Dalam beberapa tahun terakhir, pendukung kebijakan telah menghidupkan kembali upaya untuk menyusun dan mengadopsi kerangka kerja kebijakan yang berlaku secara lebih umum untuk mengatur akses ke informasi pemerintah, terlepas dari topik, program, atau tanggung jawab organisasi.

Dalam salah satu upaya tersebut, Kelompok Kerja Open Government, sebuah konsorsium yang terdiri dari 30 advokat open government, merekomendasikan delapan prinsip mengenai akses dan penggunaan data publik untuk mempromosikan wacana sipil, kesejahteraan publik, dan penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien (OpenGovData, 2009). Prinsip-prinsip ini berfokus pada karakteristik data itu sendiri.

Prinsip tersebut menyatakan bahwa data publik terbuka ketika:

- Lengkap

Semua data publik (didefinisikan sebagai data yang tidak tunduk pada batasan privasi, keamanan, atau hak istimewa yang valid) disediakan.

- Data primer  
Data dikumpulkan di sumbernya, dengan tingkat perincian sebaik mungkin, bukan dalam bentuk agregat atau modifikasi.
- Tepat waktu  
Data tersedia secepat yang diperlukan untuk mempertahankan nilai data.
- Dapat diakses  
Data tersedia untuk jangkauan terluas pengguna untuk rentang tujuan terluas.
- Dapat diproses dengan mesin  
Data disusun secara wajar untuk memungkinkan pemrosesan otomatis.
- Tidak diskriminatif  
Data tersedia untuk siapa saja, tanpa perlu registrasi.
- Non-proprietary  
Data tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kontrol eksklusif.
- Bebas lisensi  
Data tidak tunduk pada peraturan hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang apa pun. Pembatasan privasi, keamanan, dan hak istimewa yang wajar mungkin diizinkan.

The Carter Center menawarkan kebijakan yang berfokus pada akses informasi sebagai hak asasi manusia yang mendasar di semua budaya dan sistem pemerintahan (Carter Center, 2008). Rencana Aksinya merekomendasikan agar semua pemerintah dan organisasi internasional memastikan hak ini dengan menyediakan:

- Pelaksanaan hak akses yang adil;
- Pelatihan pejabat publik tentang praktik dan penerapan hak akses;
- Pendidikan publik untuk memberdayakan sepenuhnya penggunaan hak;
- Alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memastikan administrasi yang efisien dan tepat waktu;
- Penguatan pengelolaan informasi untuk mempermudah akses informasi;

Para peneliti di Universitas Princeton dan George Mason berbagi perspektif yang bertumpu pada pernyataan bahwa pemerintah harus menjadi penerbit data yang bebas, terbuka, terstruktur, dan dapat dibaca mesin, sementara inisiatif yang dipimpin oleh sektor swasta atau warga negara harus mengubah data tersebut menjadi berguna, dapat digunakan, dan produk informasi kreatif (Brito, 2007; Robinson, Yu, Zeller, & Felten, 2009). Mereka menegaskan bahwa pemerintah pasti dibatasi untuk menggunakan teknologi paling canggih secara efektif oleh serangkaian persyaratan kepatuhan yang terkait dengan privasi, kerahasiaan, pengendalian biaya, persyaratan FOIA dan lain-lain, serta kurangnya sumber daya untuk mengeksplorasi secara bersamaan banyak jalan baru manajemen informasi, analisis, dan komunikasi.

Para sarjana ini berpendapat bahwa sumber daya pemerintah akan lebih baik dihabiskan untuk menyiapkan data untuk publikasi daripada mencoba mengantisipasi apa yang ingin dilihat pengguna di situs web pemerintah yang terstruktur. Mereka lebih jauh berpendapat bahwa sektor swasta dan bahkan individu yang termotivasi lebih cocok

untuk tugas menganalisis, menggabungkan, dan menyajikan informasi kepada pengguna karena mereka kekurangan kendala ini. Entitas tersebut mewakili beragam sarana, keterampilan, dan motivasi yang membantu menyebarkan risiko inovasi dan mendorong persaingan dan dengan demikian menciptakan lebih banyak jenis produk dan layanan informasi. Contoh layanan informasi yang dapat diberikan melalui pendekatan ini sudah ada karena upaya organisasi nirlaba dan individu tertentu.

Misalnya, Sunlight Foundation mensponsori Open Congress.org, layanan berbasis web yang menggabungkan data resmi pemerintah seperti tagihan yang sedang dipertimbangkan, dengan umpan berita, blog, dan sumber daya lain yang memungkinkan orang melacak undang-undang, masalah, dan catatan pemungutan suara. Anggota yang mereka pilih (Sunlight Foundation).

## **2. Kontribusi Penelitian Tentang Transparansi Berbasis Informasi**

Penelitian ilmu politik, administrasi publik, dan ilmu informasi semuanya menyoroti tantangan transparansi pemerintah berbasis informasi. Studi-studi ini mengeksplorasi beberapa konsep yang menonjol dan mengatasi beberapa kekurangan dari upaya saat ini untuk mempromosikan transparansi melalui media informasi elektronik.

### **2.1 Pandangan Alternatif Tentang Transparansi**

Meijer mempertimbangkan transparansi mengingat tren masyarakat yang lebih besar terkait legitimasi, kepercayaan, dan keterbukaan. Dia berargumen bahwa transparansi – didefinisikan sebagai kurangnya kerahasiaan dan keterbukaan terhadap pengawasan publik – secara tradisional dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, ia menegaskan bahwa transparansi yang dimediasi komputer memiliki beberapa karakteristik yang justru dapat mengancam kepercayaan. Tidak seperti bentuk transparansi langsung dan tatap muka, transparansi yang dimediasi komputer bersifat searah (yaitu, tidak interaktif), didekontekstualisasikan (yaitu, dihapus dari pengalaman sosial bersama), dan terlalu terstruktur (yaitu, sangat selektif dan disederhanakan dengan bias terhadap informasi kuantitatif).

Dengan menggunakan contoh pelaporan kinerja sekolah Belanda, dia menunjukkan bagaimana daftar topik selektif parsial yang perlu dibahas oleh laporan kinerja sekolah mendominasi persepsi kinerja, meningkatkan ambiguitas, dan berkontribusi pada jarak yang lebih jauh dalam hubungan antara orang tua, guru, dan manajer sekolah (Meijer, 2009).

Penelitian kualitas data menawarkan wawasan tentang salah satu tantangan praktis yang paling sulit dari akses publik. Kualitas paling sering dicirikan sebagai akurasi sederhana, tetapi penelitian menunjukkan bahwa data berkualitas tinggi seharusnya tidak hanya baik secara intrinsik, tetapi juga sesuai konteks untuk tugas, diwakili dengan jelas, dan dapat diakses oleh pengguna. Di lain kata-kata, perlu "cocok untuk digunakan" (Wang & Strong, 1996). Informasi yang sama mungkin cocok untuk beberapa penggunaan, tetapi sama sekali tidak sesuai untuk penggunaan lainnya, terutama yang memiliki waktu, keamanan, perincian, atau persyaratan lain yang berbeda. Selain itu, asumsi yang tidak realistis tentang kualitas dan kegunaan informasi sering menjadi masalah, termasuk kepercayaan umum bahwa informasi itu objektif, netral, dan tersedia

(Radin, 2006). Penelitian telah menunjukkan bahwa interoperabilitas e-government dan integrasi informasi sangat sensitif terhadap berbagai pertimbangan kualitas termasuk kelengkapan, kewenangan, jaminan atau kepercayaan, dan nilai yang dirasakan sebagaimana ditentukan oleh pencari informasi (Klischewski & Scholl, 2006).

Agar pencari informasi dapat menilai kualitas data, mereka perlu memahamisifat data dan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kualitas atau kesesuaiannya untuk tujuan penggunaan. Karena produsen data tidak dapat mengantisipasi semua pengguna dan penggunaan, penyediaan metadata berkualitas baik sama pentingnya dengan kualitas data itu sendiri (Dawes et al., 2004).

Penekanan pada dan popularitas pengukuran kinerja saat ini telah menghasilkan serangkaian pertimbangan kualitas penting lainnya. Ukuran kinerja didominasi oleh indikator-indikator kuantitatif dari aspek-aspek kinerja pemerintah yang dipilih. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ukuran terukur secara inheren merupakan representasi yang tidak akurat dari proses kompleks yang menghasilkan kinerja. Selain itu, mengingat rumitnya banyak program dan organisasi, tidak mungkin untuk mengukur semua aktivitas yang menghasilkan nilai. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan yang dapat dengan mudah diukur cenderung menjadi kegiatan yang diukur, mendorong kecenderungan terkait untuk menilai lebih tinggi hal-hal yang mudah diukur dan dengan demikian meremehkan atau mengabaikan hal-hal yang tidak mudah diukur. Salah satu konsekuensinya adalah ketergantungan pada pengukuran yang mungkin tepat, tetapi tidak relevan (Jacobides & Croson, 2001).

## **2.2 Desain Program Dan Tantangan Manajemen**

Penelitian lain menekankan tantangan merancang dan mengelola program akses informasi elektronik. Satu studi meninjau 22 program akses untuk mengidentifikasi 15 faktor atau dimensi desain utama. Delapan dimensi menangani pengguna informasi, pemasok, konten, dan penggunaan. Tujuh lainnya mempertimbangkan aspek teknis dan manajerial dari program akses dan konteks organisasinya. Kerangka terintegrasi mempertimbangkan bagaimana komponen ini berinteraksi dalam konteks program akses informasi yang lengkap (Dawes et al., 2004).

Penelitian yang sama juga mencakup pengembangan dan evaluasi tiga repositori data prototipe. Di masing-masing, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan penggunaan informasi pemerintah untuk perencanaan dan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses berbasis web ke data dan catatan elektronik. Dalam ketiga proyek tersebut, desainer harus menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sembari memastikan bahwa desain (1) dapat dipertahankan, (2) tidak mengancam privasi, keamanan, atau kerahasiaan subjek atau kontributor data, dan (3) kurangnya staf dan sumber daya teknis sebagai alasan mengapa upaya berbagi informasi gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Mereka juga khawatir tentang bagaimana data bersama akan digunakan dan apakah mereka dapat mengontrol atau mencegah penyalahgunaan (Dawes, 1996). Studi berikutnya menunjukkan bahwa, pembagian informasi intra-pemerintah lebih mungkin berhasil ketika beberapa kondisi terpenuhi: pertama, ketika kebijakan diterapkan dan alat praktis tersedia yang membuat pembagian menjadi sah dan layak; kedua, ketika jaringan hubungan sosial yang tepercaya mendasari proses berbagi; dan ketiga, ketika peran dan hubungan jelas dan dipahami secara luas oleh semua peserta (Pardo, Gil-Garcia, & Burke, 2008).

### 2.3 Tantangan Berbagi Informasi

Penelitian dalam berbagi informasi lintas batas dan interoperabilitas dalam pemerintahan menawarkan wawasan tambahan yang mungkin berguna dalam merumuskan kerangka kebijakan untuk inisiatif transparansi publik. Ketika informasi dibagikan melintasi batas-batas organisasi atau tingkatan dalam pemerintahan, para peserta umumnya mengharapkan manfaat tertentu seperti biaya yang lebih rendah, kualitas informasi yang lebih baik, dan kemampuan untuk menangani masalah yang lebih kompleks. Namun, mereka juga mengenali risiko perbedaan data, salah tafsir, dan pengurusan sumber daya. Dalam satu studi, hampir semua responden mengakui dan mendukung manfaat berbagi informasi, tetapi 40% juga menyebutkan kurangnya definisi data umum, perencanaan dan konsultasi yang tidak memadai tentang penggunaan data, dan staf dan sumber daya teknis yang tidak memadai sebagai alasan mengapa upaya berbagi informasi gagal untuk dicapai. ujung yang diinginkan. Mereka juga khawatir tentang bagaimana data bersama akan digunakan dan apakah mereka dapat mengontrol atau mencegah penyalahgunaan (Dawes, 1996). Studi berikutnya menunjukkan bahwa, pembagian informasi intra-pemerintah lebih mungkin berhasil ketika beberapa kondisi terpenuhi: pertama, ketika kebijakan diterapkan dan alat praktis tersedia yang membuat pembagian menjadi sah dan layak; kedua, ketika jaringan hubungan sosial yang tepercaya mendasari proses berbagi; dan ketiga, ketika peran dan hubungan jelas dan dipahami secara luas oleh semua peserta (Pardo, Gil-Garcia, & Burke, 2008).

Garis penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah mana pun yang mencari manfaat dari berbagi informasi internal memerlukan seperangkat kebijakan yang menyeimbangkan risiko dan manfaat. Ini menawarkan sepasang prinsip pelengkap – penatagunaan dan kegunaan – untuk memandu keputusan tentang bagaimana, mengapa, kapan, dan siapa yang menggunakan informasi pemerintah (Dawes, 1996). Prinsip-prinsip ini, seperti yang dibahas di bawah, sama relevannya dan bahkan lebih menonjol ketika informasi harus tersedia di luar pemerintah

### 3. Prinsip-Prinsip Kebijakan Informasi: Penatalayanan Dan Kegunaan

Kedua prinsip ini menawarkan kerangka kerja sederhana untuk bekerja melalui berbagai tujuan dan tantangan yang melekat pada inisiatif transparansi berbasis informasi.

Penatagunaan adalah prinsip konservatif yang mengakui bahwa informasi pemerintah berbagi beberapa karakteristik barang publik seperti udara bersih dan jalan yang aman. Kamus mendefinisikan “penatalayanan” sebagai pengelolaan yang hati-hati dan bertanggung jawab atas sesuatu yang dipercayakan kepada pemeliharaan seseorang. Diterapkan pada informasi, steward ship berfokus pada memastikan akurasi, validitas, keamanan, pengelolaan, dan pelestarian kepemilikan informasi. Penatagunaan tidak menetapkan satu titik tanggung jawab, melainkan menyampaikan gagasan bahwa semua pejabat publik dan organisasi pemerintah bertanggung jawab untuk menangani informasi dengan hati-hati dan berintegritas, terlepas dari tujuan atau sumber aslinya. Penatagunaan menuntut agar informasi pemerintah diperoleh, digunakan, dan dikelola sebagai sumber daya yang memiliki nilai organisasi, yurisdiksi, atau sosial lintas tujuan dan dari waktu ke waktu (Dawes, 1996). Dengan demikian mempromosikan dua persyaratan penting untuk transparansi berbasis informasi: melindungi informasi pemerintah dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan; dan itu membuat informasi "cocok untuk digunakan."

Kebijakan yang mempromosikan perlindungan informasi mengatasi masalah seperti keamanan informasi dan sistem, kerahasiaan data sensitif, kualitas informasi,

manajemen catatan, dan pelestarian informasi jangka panjang dengan nilai sosial, hukum, atau historis yang bertahan lama. Standar data dan metadata, misalnya, mengatur bagaimana elemen data dijelaskan, didefinisikan, dan direpresentasikan dalam sistem. Standar ini berkontribusi pada kualitas data dan kemampuan untuk menggunakan data untuk lebih dari satu tujuan. Manajemen rekod, retensi, dan aturan disposisi tidak hanya menentukan alasan dan cara di mana rekod publik dibuat dan dipelihara untuk penggunaan aktif, tetapi juga bagaimana rekod tersebut disimpan untuk generasi mendatang. Kebijakan keamanan membantu memastikan bahwa informasi dan sistem dilindungi dari penggunaan atau penyalahgunaan yang tidak sah.

Prinsip manfaat mengakui bahwa informasi pemerintah merupakan aset berharga yang dapat menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi melalui penggunaan aktif dan inovasi. Institut Standar dan Teknologi Nasional AS (NIST) menjelaskan kegunaan atau kegunaan informasi sebagai berikut: “kegunaan” berarti bahwa informasi yang disebarluaskan bermanfaat bagi pengguna yang dituju; “berguna” berarti bahwa isi informasi bermanfaat, bermanfaat, atau dapat digunakan untuk pengguna yang dituju, atau bahwa informasi tersebut mendukung kegunaan informasi yang disebarluaskan lainnya dengan membuatnya lebih mudah diakses atau lebih mudah untuk dibaca, dilihat, dipahami, diperoleh, atau menggunakan.



**Gambar 1.** Model konseptual dari prinsip transparansi berbasis informasi.

Kebijakan dan praktik yang mendorong kegunaan dan utilitas memberikan pedoman dan insentif kepada lembaga untuk berbagi data dan sumber daya informasi terkait untuk memberi manfaat bagi berbagai pengguna publik dan swasta. Mereka mendorong investasi dalam manajemen informasi, analisis dan presentasi dan meletakkan dasar bagi mekanisme organisasi dan keuangan untuk mendukung pembagian dan akses informasi di dalam pemerintahan dan dengan publik (Dawes, 1996). Kebijakan yang mempromosikan kegunaan meningkatkan akses publik ke informasi pemerintah, mendorong kemitraan informasi publik-swasta, dan memungkinkan kombinasi atau penggunaan kembali informasi untuk tujuan baru. Kebijakan-kebijakan ini juga dapat menangani penggunaan informasi yang lebih baik di dalam pemerintahan melalui pembagian informasi antar-lembaga dan antar-pemerintah serta melalui penggunaan informasi secara kreatif untuk meningkatkan kualitas atau menurunkan biaya kegiatan dan program pemerintah atau untuk menciptakan layanan baru atau menemukan cara yang lebih baik dalam melakukan kegiatan tradisional. bisnis.

Kedua prinsip ini mungkin tampak berlawanan, tetapi keduanya juga dapat dipandang sebagai saling melengkapi. Meskipun mereka melayani tujuan yang berbeda, tujuan tersebut kompatibel dan dapat saling memperkuat. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, kebijakan penata layanan tidak hanya dapat membantu menghasilkan informasi yang lebih berkualitas, lebih dapat diandalkan, dan dikelola dengan lebih baik, tetapi juga dapat menciptakan praktik yang teruji dan terdokumentasi dengan baik, yang pada gilirannya memastikan bahwa pencari informasi akan dapat menentukan



kesesuaian. untuk digunakan. Produk penatagunaan ini mengurangi risiko penyalahgunaan, dan memungkinkan pemahaman publik yang lebih baik dan kepercayaan yang lebih besar terhadap informasi pemerintah, sehingga mendorong alat dan penggunaan yang inovatif. Karena penggunaan ini menjadi lebih baik dan lebih dikenal, mereka meningkatkan permintaan akan data dan apresiasi untuk kebijakan dan aktivitas yang menjamin kualitasnya.

Bagian di bawah menyajikan tes awal dari pandangan ini dengan menilai dua dialog publik online berturut-turut tentang transparansi berbasis informasi. Dialog pertama dilakukan dalam tiga fase pada musim semi dan musim panas 2009. Dialog ini mengundang komentar publik tentang berbagai masalah transparansi, termasuk ide untuk kerangka dasar Data.gov. Dialog kedua, dilakukan pada awal 2010, dan berfokus pada Data.gov Draft Concept of Operations (CONOP) (Office of Management and Budget & CIO Council, 2009). Dokumen CONOP disiapkan oleh OMB dan Dewan CIO Federal untuk menjelaskan tujuan, arsitektur, infrastruktur, nilai, dan operasi Data.gov setelah beroperasi selama sekitar enam bulan. Dialog kedua ini mengundang pengguna Data saat ini dan potensial. gov untuk berkomentar dan memberikan saran untuk perbaikan.

## **E. KESIMPULAN**

Dua prinsip luas penatagunaan dan kegunaan membantu menyederhanakan dan menyeimbangkan banyak pertimbangan yang diperlukan untuk mencapai transparansi pemerintah yang lebih besar dan untuk mewujudkan potensi nilai publik dari informasi pemerintah. Penatalayanan berkaitan dengan memastikan tanggung jawab, validitas, dan legitimasi; kegunaan dengan mendorong aplikasi, eksplorasi, dan inovasi. Tanpa penerapan penatagunaan yang simultan dan hati-hati, penekanan yang kuat pada penggunaan dapat menyebabkan hasil yang tidak efektif, tidak akurat, atau menyesatkan. Namun, tanpa mendorong penggunaan, prinsip penatagunaan ditambah konservatisme yang melekat dan kendala pada birokrasi dapat mencegah pemerintah dan masyarakat memperoleh nilai publik yang lebih besar dari investasi dalam informasi pemerintah.

Penelitian di masa depan tentang topik ini dapat berfokus pada beberapa bidang. Pertama, studi evaluasi dapat memanfaatkan eksperimen alami yang direpresentasikan dalam dialog Open Government. Misalnya, seberapa baik kebijakan yang akhirnya diadopsi mencerminkan komentar dialog? Sejauh mana mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mendasari pemerintahan terbuka? Apa elemen, format, dan dinamika dialog publik yang efektif? Agenda penelitian ilmu komputer dan teknologi terkait dapat mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi berbagai alat manajemen, analisis, dan presentasi informasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan penggunaan dan pengguna yang berbeda

Penelitian juga dapat bertujuan untuk mengembangkan kerangka penilaian yang mendefinisikan dan mengevaluasi kemampuan yang dibutuhkan organisasi pemerintah untuk menjamin transparansi. Kemampuan ini perlu membahas kepengurusan dan kegunaan, serta keseimbangan di antara keduanya. Tujuan dari kerangka kerja semacam itu adalah untuk membantu organisasi pemerintah menentukan keseimbangan yang sehat antara penatagunaan dan kegunaan dalam domain kebijakan yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda. Studi yang menerapkan kerangka seperti itu akan menghasilkan data untuk menguji dan menyempurnakan model konseptual yang diusulkan tentang hubungan koreksi diri antara penatagunaan dan kegunaan. Hasil penelitian semacam ini juga dapat berkontribusi langsung pada peningkatan praktik dengan membantu profesional pemerintah mengelola konten informasi dengan lebih baik, merancang sistem yang lebih baik, dan mengembangkan inisiatif pemerintahan terbuka yang lebih efektif.

Agenda penelitian kebijakan juga terlihat jelas. Hasil brainstorming Inisiatif Pemerintah Terbuka hanyalah upaya pertama dan proksi kasar untuk serangkaian pertimbangan lengkap yang harus masuk ke inisiatif transparansi yang diterapkan sepenuhnya. Masih ada pertanyaan penting: Apakah semua masalah yang menonjol telah teridentifikasi? Apakah semua pemangku kepentingan yang sah memiliki suara? Apakah metode mencari keterlibatan publik ini adil, dapat diakses, responsif, terbuka? Apakah itu menghasilkan kepercayaan publik? Jawaban atas pertanyaan ini dan pertanyaan serupa akan membantu menentukan keefektifan dan nilai transparansi berbasis informasi

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Bannister, F. (2007). Kutukan tolok ukur: Penilaian validitas dan nilai perbandingan e-government.
- Tinjauan Internasional Ilmu Administrasi, 73(2), 171-188.
- Benkler, Y. (1998). The commons sebagai faktor diabaikan kebijakan informasi. Makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Riset Telekomunikasi Tahunan ke-26, Arlington, VA.
- Brito, J. (2007). Hack, mash & peer: Transparansi pemerintah crowdsourcing. Pusat Mercatus: Universitas George Mason Diperoleh 20 April 2010 dari [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1023485](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1023485).
- Pusat Carter (2008). Deklarasi Atlanta dan rencana aksi untuk kemajuan hak atas akses informasi. Konferensi Internasional tentang Hak atas Informasi Publik. GA: Atlanta.
- Kaukus Transparansi Kongres (2010). Prinsip kami. Diambil 20 April 2010 dari [http://quigley.house.gov/images/stories/2010-03-10\\_transparency\\_Caucus\\_-\\_Our\\_Principles.pdf](http://quigley.house.gov/images/stories/2010-03-10_transparency_Caucus_-_Our_Principles.pdf).
- Dawes, SS (1996). Berbagi informasi antar lembaga: Manfaat yang diharapkan, risiko yang dapat dikelola. *Jurnal Analisis dan Manajemen Kebijakan*, 15(3), 377-394.
- Dawes, SS (2010). Meta-prinsip kebijakan informasi: Penatalayanan dan kegunaan. Kauai, HI: Konferensi Internasional Hawaii tentang Ilmu Sistem.
- Dawes, SS, Pardo, TA, & Cresswell, AM (2004). Merancang program akses informasi pemerintah elektronik: Pendekatan holistik. *Informasi Pemerintah Triwulanan*, 21(1), 3-23.
- Kantor Eksekutif Presiden (2009). Memorandum tentang transparansi dan pemerintahan terbuka. Diakses pada 20 April 2010, dari [http://www.whitehouse.gov/the\\_press\\_office/Transparency\\_and\\_Open\\_Government/](http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Transparency_and_Open_Government/).
- Komite Data Geografis Federal. Infrastruktur data spasial nasional. Diakses 20 April 2010, dari <http://www.fgdc.gov/nsdi/nsdi.html>.
- Holden, JP (2009). Kantor eksekutif presiden; transparansi dan pemerintahan terbuka. Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi. *Daftar Federal*, Vol. 74. (hlm. 23901-23902).
- Jacobides, MG, & Croson, DC (2001). Kebijakan informasi: Membentuk nilai hubungan agensi. *Jurnal Akademi Manajemen*, 26(2), 202-223.
- Jaeger, PT (2007). Kebijakan informasi, akses informasi, dan partisipasi demokratis: Implikasi nasional dan internasional dari kebijakan informasi pemerintahan semak. *Informasi Pemerintah Triwulanan*, 24, 840-859.

- Karr, AF (2008). Akses warga negara ke informasi statistik pemerintah. Dalam H. Chen, L. Brandt, V. Gregg, R. Traunmuller, S. Dawes, E. Hovy, A. Macintosh, & CA Larson (Eds.), *Pemerintah digital: Penelitian e-government, studi kasus, dan implementasi* (hlm. 503-529). New York, NY: Springer.
- Klischewski, R., & Scholl, HJ (2006). Kualitas informasi sebagai landasan bersama bagi para pemain kunci dalam integrasi dan interoperabilitas e-government. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Hawaii ke-39 tentang Ilmu Sistem, Big Island, Hawaii.
- Meijer, A. (2009). Memahami transparansi modern. *Tinjauan Internasional Ilmu Administrasi*, 75(2), 255-269.
- Kantor Manajemen dan Anggaran (2009). *Arahan pemerintah terbuka*. Diambil 20 April 2010 dari [http://www.whitehouse.gov/omb/assets/memoranda\\_2010/m10-06.pdf](http://www.whitehouse.gov/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf).
- Kantor Manajemen dan Anggaran dan Dewan CIO (2009). *Draf konsep operasi Data.Gov, v0.7*. Diambil 20 April 2010 dari <http://www.ideascale.com/userimages/sub-1/736312/ConOpsFinal.pdf>.
- OpenGovData (2009). *Rekomendasi kebijakan data terbuka*. Diakses 20 April 2010, dari <http://www.wiki.opengovdata.org/index.php/OpenDataPolicyRecommendation>.
- Pardo, TA, Gil-Garcia, JR, & Burke, GB (2008). Struktur tata kelola dalam berbagi informasi lintas batas: Pelajaran dari prakarsa peradilan pidana negara bagian dan lokal. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Hawaii ke-41 tentang Ilmu Sistem, Big Island, Hawaii.
- Radin, B. (2006). *Menantang gerakan kinerja: Akuntabilitas, kompleksitas, dan nilai-nilai demokrasi*. Washington, DC: Pers Universitas Georgetown.
- Robinson, D., Yu, H., Zeller, WP, & Felten, EW (2009). *Data pemerintah dan tangan tak terlihat*. *Jurnal Hukum dan Teknologi Yale*, 11(160).
- Yayasan sinar matahari. *Opencongress.org*. Diakses 20 April 2010, dari <http://www.opencongress.org>.
- Trudeau, L. (2009). *Ringkasan analisis brainstorming pemerintahan terbuka*. Washington, DC: Akademi Nasional Administrasi Publik.
- Badan Perlindungan Lingkungan AS. *Inventaris rilis beracun*. Diakses pada 20 April 2010, dari <http://www.epa.gov/tri/triprogram/whatis.htm>.
- Wang, RY, & Kuan, DM (1996). Melampaui akurasi: Arti kualitas data bagi konsumen data. *Jurnal Sistem Informasi Manajemen*, 12(4), 5-33.